

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Lembaran Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persembahan	iv
Prakata.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Intisari	xiv
Abstract	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.2. Konsep dan Teori	21
2.2.1. Pariwisata	21
2.2.1.1. Pengertian Pariwisata.....	21
2.2.1.2. Pengembangan Pariwisata.....	22

2.2.2. Public Goods	26
2.2.3. Land Grabbing	29
2.2.4. Peran Pemerintah	33
2.2.4. Ekonomi Politik	36
2.2.4.1. Kapitalisme, Globalisasi dan Neo Liberalisme.....	38
2.2.4.2. Governmentality.....	42
2.2.4.3. Public Choice	51
2.3. Kerangka Berpikir.....	54
BAB III. METODE PENELITIAN.....	65
3.1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	65
3.2. Lokasi Penelitian.....	66
3.3. Sumber Data.....	66
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.5. Teknik Analisis Data.....	76
BAB IV. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	78
4.1. Gambaran Umum Sumba Barat	78
4.2. Potensi Parisata Sumba Barat	80
4.3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
4.4. Profil ODTW Nihiwatu.....	85
4.4.1. Kawasan Nihiwatu	86
4.4.1.1. Kepemilikan Kawasan Nihiwatu.....	86
4.4.1.2. Pemanfaatan Lahan dan Pantai di Kawasan Nihiwatu.....	88
4.4.1.3. Akses ke Kawasan Nihiwatu.....	90

4.4.2. Resort Nihiwatu	92
4.4.2.1. Sejarah Resort Nihiwatu	92
4.4.2.2. Pembangunan dan Pengembangan Resort Nihiwatu.....	93
BAB V. PENCAPLOKAN BARANG PUBLIK	97
5.1. Aktor-aktor Pelaku Pencaplokan.....	97
5.1.1. Pemerintah Pusat.....	98
5.1.2. Pemerintah Sumba Barat.....	99
5.1.3. Investor/PT. IAS	101
5.1.4. Tokoh/Politisi Lokal.....	102
5.1.5. Yayasan Sumba Peduli Sesama	103
5.1.6 United Nations (PBB)	104
5.1.7. Masyarakat Pemilik Tanah.....	105
5.2. Modus/Cara Dalam Pencaplokan.....	105
5.2.1. Pendekatan Terhadap Tokoh Lokal	105
5.2.2. Pendekatan Terhadap Tokoh Masyarakat	106
5.2.3. Iming-Iming Uang dan Penghasilan	107
5.2.4. Membuat Masyarakat Merasa Diuntungkan	109
5.2.5. Mempekerjakan Warga Lokal.....	111
5.2.6. Menjanjikan Bantuan Sosial	113
5.2.7. Mendirikan Yayasan	113
5.2.8. Mengintimidasi/Upaya Paksa.....	114
5.2.9. Kepemilikan Tanah ‘Nomine’	116
5.3. Motivasi dari Aktor-aktornya.....	116

5.3.1. Investor/PT. IAS	117
5.3.2. Tokoh/Politisi Lokal.....	118
5.3.3. Pemerintah Pusat.....	119
5.3.4. Pemerintah Sumba Barat.....	120
5.3.5. Masyarakat Pemilik Tanah.....	121
5.4. Dampak Kehadiran Hotel Bagi Masyarakat dan Pemerintah Sumba Barat.....	121
5.5. Ekonomi Politik Pencaplokan Barang Publik.....	126
5.5.1. Penguasaan Kawasan ODTW Nihiwatu Sebagai Pencaplokan Barang Publik.....	127
5.5.2. Kapitalisme dalam Pencaplokan ODTW Nihiwatu	129
5.5.3. Kepengaturan dalam Pencaplokan ODTW Nihiwatu	138
BAB VI. PERAN PEMERINTAH SUMBA BARAT DALAM PEMANFAATAN BARANG PUBLIK ODTW NIHIWATU	151
6.1. Pesisir, Pantai dan Laut Nihiwatu	151
6.2. Pandangan Pemerintah Sumba Barat Terhadap ODTW Nihiwatu	156
6.3. Pilihan Publik Peran Pemerintah Sumba Barat dalam Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan ODTW Nihiwatu.....	160
6.4. Upaya Pemerintah Sumba barat Membuka Akses Publik ke ODTW Nihiwatu.....	163
BAB VII. PENUTUP.....	166
7.1. Simpulan	166
7.2. Rekomendasi.....	168

DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN.....	177